

## **Kebijakan Tata Kelola (*Governance*) Perusahaan Daerah Pada Pasar Tradisional Di Kecamatan Kundur**

Ari Herlina<sup>1</sup>, H. Jamhur Poti<sup>2</sup>, Edison<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email : [ariherlina01@gmail.com](mailto:ariherlina01@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Pasar tradisional merupakan tempat favorit bagi masyarakat terutama kalangan bawah dan menengah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional mempunyai ciri khas yaitu adanya proses tawar-menawar, namun pengelolaan pasar yang kurang baik menyebabkan pasar menjadi kumuh dan tidak terawat kebersihannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan tata kelola (*governance*) Perusahaan Daerah pada pasar tradisional di kecamatan Kundur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 dinas perindustrian dan perdagangan, 2 Perusahaan Daerah, 1 dinas pekerjaan umum, 4 orang pedagang pasar tradisional Tanjungbatu dan 3 orang masyarakat sebagai pengunjung pasar tradisional Tanjungbatu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Tata kelola (*Governance*) Perusahaan Daerah pada pasar Tradisional Tanjungbatu Kecamatan Kundur telah berjalan sesuai dengan yang di harapkan, artinya tiga pilar utama penyelenggaraan *good governance* telah berperan sesuai harapan tetapi terdapat beberapa indikator yang perlu di perhatikan serius yaitu indikator Transparansi dan visi strategi. Kedua indikator tersebut dalam perspektif pelaku usaha swasta dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dibenahi oleh pemerintah, karena terkait dengan realitas aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

**Kata-kata kunci:** *good governance*, pemerintah, pelaku usaha swasta, masyarakat

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

Bratakusumah dan Solihin (2001:186) menyebutkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat maka dibangunlah fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta,

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar dimana fungsinya adalah melayani masyarakat disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar, sangat dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola pasar yang baik dan terintergritas. Hal ini dilakukan demi mendapatkan pasar yang lebih profesional baik demi kenyamanan para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen/pelanggan.

Menurut Sedarmayanti (2003) institusi dari *good governance* meliputi 3 domain yaitu: Negara/pemerintah, Sektor swasta, Masyarakat madani. Berkaitan dengan *good Governace*, UNDP (*United Nation Development Program*) mengajukan 9 karakteristik: Partisipasi, Penegak Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Pada Konsensus Keadilan, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas, dan Visi strategi.

Tanjungbatu kundur merupakan salah satu pulau yang terdapat di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Di Tanjungbatu ini terdapat satu pasar tradisonal yang berlokasi di jalan merdeka Tanjungbatu Kota. Pasar ini berdiri sejak tahun 1960 hingga sekarang. Pasar ini di kelola oleh perusahaan daerah. Keberadaan pasar Tanjungbatu terletak di tengah-tengah kota yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan Tanjungbatu.

Berdasarkan pemantauan dan data yang didapat dari pihak terkait tempat-tempat yang telah disediakan oleh pihak pasar adalah:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah kios pasar Tanjungbatu**

No	Nama-Nama Kios	Jumlah
1	Kios	58
2	Meja Ikan/Daging	40
3	Kaki Lima	15
4	Kain Tenda	15
5	Meja Sayur	41
	Jumlah	154

Sumber: PERUSDA Kundur

Dengan banyaknya pedagang yang berdagang di pasar Tanjungbatu ini maka sudah semestinya pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai karena para pedagang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi daerah.

Namun terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Tanjungbatu Kundur adalah pertama, penataan pasar yang tidak beraturan para pedagang seenaknya menggelar dagangan mereka di sepinggiran jalan pasar. Kedua, kurangnya meja tempat jualan, pasar Tradisonal Kecamatan Kundur bisa dikatakan cukup ramai pedagang dan pembelinya, sehingga dimungkinkan untuk pelebaran tempat berjualan agar para pedagang tidak lagi berjualan ditrotoar serta badan jalan dan kurang nya pengawasan dari PRUSD sehingga membuat para pedang menggelar dagaangannya di trotoar. Ketiga, Kebersihan pasar, Pasar Tanjungbatu merupakan pasar dimana kebersihannya perlu di perhtikan karna

pasar tersebut kumuh, semrawut, becek, bau dan sumpek. Keempat, area parkir yang kurang memadai sehingga membuat masyarakat memarkirkan kendaraannya di sembarangan tempat.

Keadaan pasar yang ada sekarang ini khususnya pasar Tanjungbatu belum ditata dengan baik dan teratur, dimana banyaknya para pedagang yang masih menggelar dagangannya ditempat yang tidak seharusnya, keadaan pasar yang tidak nyaman serta area parkir yang kurang sehingga mengganggu para pembeli untuk menuju pasar tersebut dan tidak teraturnya jenis barang yang dijual di pasar Tanjungbatu tersebut. Sehingga menarik bagi peneliti untuk meneliti tentang Kebijakan Tata Kelola (Governance) Perusahaan Daerah pada Pasar Tradisional Di Kecamatan Kundur.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 dinas perindustrian dan perdagangan, 2 Perusahaan Daerah, 1 dinas pekerjaan umum, 4 orang pedagang pasar tradisional Tanjungbatu dan 3 orang masyarakat sebagai pengunjung pasar tradisional Tanjungbatu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pikiran dari Sedarmayanti (2003) dalam Good Governace terdapat 3 komponen yaitu Negara, Sektor swasta dan Masyarakat. Indikator *Good governance* yang dianalisis adalah mengacu pada United Nations Development Programmes (UNDP), yaitu: partisipasi; 2) Tegaknya supremasi Hukum; 3) Transparansi; 4) Pedul pada

stakeholder; 5) berorientasi pada konsensus; 6) keadilan; 7) efektifitas dan efisien; 8) akuntabilitas, and 9) visi strategi.

## PEMBAHASAN

Kebijakan Tata Kelola (Governance) Perusahaan Daerah Pada Pasar Tradisional Di Kecamatan Kundur dianalisis pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah, pelaku usaha swasta, dan masyarakat. Berikut uraian temuan penelitian dan analisis data untuk pilar pertama, yaitu pemerintah dalam penyelenggaraan *good governance* uraiannya sebagai berikut:

### 1. Pilar Pemerintah

Pada bagian ini diuraikan hasil temuan penelitian untuk pilar pemerintah atau pelaku birokrasi pada Pasar Tradisional Kecamatan Kundur adalah sebagai berikut:

#### a. Partisipasi

Partisipasi merupakan bagian tak terpisahkan dari terselenggaranya *good governance* secara utuh. Partisipasi di sini ialah para pelaku birokrasi melibatkan pedagang dan tokoh masyarakat untuk mengikuti rapat dalam pengambilan keputusan untuk pembangun pasar tradisional Kecamatan Kundur Kedepanya. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil atau tidaknya pembangunan tidak saja di tangan pemerintah tetapi juga di tangan masyarakat.

#### b. Tegaknya Supermasi Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan

hukum. sehubungan dengan itu, dalam proses renovasi pasar Tanjungbatu pihak PERUSDA dan DESPERINDAG melakukan renovasi dengan mengikuti dasar hukum telah di tentukan yaitu Dasar hukumnya yaitu Perandag RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang pedoman, penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern. Lalu di perbarui pada Permandag nomor 70/M-DAG/PER/12/2013

c. Transparansi

Secara internal demokrasi pemerintahan yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dikembangkan dan bahkan perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Respons pegawai/pelaku birokrasi terhadap praktek transparansi khusus sub indicator: harga sewa meja, kios dan ruko-ruko yang ada di pasar Tanjungbatu. Harga sewa setiap meja dan kios itu beda-beda, cara pembayarannya juga berbeda. Ada yang membayar setiap hari dan ada yang perbulan. pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peduli pada Stekholder

Sikap proaktif atau ketanggapan pegawai/pelaku birokrasi sebagai penyelenggara dibidang pemerintahan merupakan factor yang perlu dikembangkan. Artinya sebagai pelayanan masyarakat bukan menganut paradigma “dilayani masyarakat” tetapi menuju pada paradigma “melayani masyarakat”, sehingga keberadaan pemerintah

sebagai public service sesuai harapan dalam mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Indicator responsiveness dalam mewujudkan good governance meliputi sub indicator: hambatan di Pasar Tanjungbatu Kundur. hambatannya yaitu para pedagang tidak mau di pindahkan kelokasi yang telah di sediakan. para pelaku birokrasi telah berusaha membuat pasar Tanjungbatu ini menjadi lebih baik dan mengusulkan untuk di pindahkan lokasi pasar ke tempat yang lebih luas untuk mereka berjualan..

e. Birokrasi Pada Konsensus

Consensus orientation merupakan bentuk komunikasi yang perlu ditumbuh kembangkan sebagai salah satu forum dialog menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga pada akhirnya program yang disusun dapat disosialisasikan kepada unsur masyarakat dan pelaku usaha. Sub indikator solusi penyelesaian masalah. Dikarnakan Masyarakat tidak mau dipindahkan ke lokasi yang baru maka pelaku birokrasi melakuka rapat ulang berkali-kali untuk pengambilan keputusan mengenai pasar Tanjungbatu Kundur. pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan yang berbeda untuk memcapai kesepakatan yang baik bagi kepentingan masing-masing pihak.

f. Keadilan

Setiap pegawai/pelaku birokrasi harus memahami perannya sebagai pelayanan masyarakat dengan memperlakukan seluruh anggota masyarakat dan pelaku usaha di dalam pelayanan tanpa perbedaan. Oleh karena itu sikap tanggap dari pegawai/pelaku birokrasi mutlak diperlukan. sub indikator: pembagian lapak yang baru untuk para pedagang. Pelaku birokrasi ini sangat mengedepankan keadilan kepada para pedagang, mereka berencana melakukan cabut undi pada saat pembagian meja untuk para pedagang nantinya apabila pasar tersebut telah selesai di lakukan. pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik kepada masyarakatnya.

g. Efektif dan efisien

Efektiviness dan efficiency adalah kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna. efektifitas dan efisien tertuju pada tujuan yang hendak di capai dan waktu dalam pelaksanaa kegiatan. Waktu pembangunan pasar Tanjungbatu ini memakan waktu 2 tahun lebih yaitu 660 hari kalender untuk pelaksanaan dan di tambah 180 hari kalender untuk pemeliharaan.

h. Akuntabilitas

Pejabat public dalam melaksanakan tugasnya adalah hasil sinergi antara pejabat tersebut dengan para bawahan secara utuh. Pertanggungjawaban pejabat publik itu dapat dilihat atau diukur pada sub-sub indikator dari *accountability*, yaitu pengawasan harga barang dagangan di pasar Tanjungbatu Kundur. Pelaku birokrasi ini ingin

mentransparansikan harga barang kepada para masyarakat dengan cara menyediakan papan harga yang akan di pasang di depan pintu masuk pasar Tanjungbatu Kecamatan Kundur agar para masyarakat tidak tertipu dengan para pedagang yang curang dan tidak bertanggungjawab pada saat melakuka proses jual beli

i. Visi Startegi

Setiap pegawai/pelaku birokrasi harus memiliki pandangan strategis menghadapi masa yang akan datang. Strategic vision dengan sub indikator; perencanaan selanjutnya untuk pasar Tanjungbatu Kundur. rencana selanjunya setelah pasar Tanjungbatu Kecamatan Kundur ini selesai maka mereka akan melnjutkan pembangun pasar di daerah lain.

2. Pilar Pelaku Usaha Swasta

Uraian tentang pelaku usaha swasta dalam penyelenggaraan *good governance* temuan penelitian dan analisis dengan pegawai/pelaku birokrasi. Pemaparan sembilan indikator *good governance* diuraikan sebagai berikut:

a. Partisipasi

Keikutsertaan pelaku usaha swasta dalam mengawal kebijakan pemerintah menjadi hal penting dalam penyelenggaraan *good governance*. Sebab unsur pelaku usaha swasta adalah bagian yang tak terpisahkan dengan unsur pemerintah dalam penyelenggaraan *good*

*governance*. Pelaku swasta dan masyarakat melakukan partisipasinya dalam bentuk musyawarah untuk membahas tentang pasar Tanjungbatu Kundur. Kebebasan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan kebebasan untuk berpartisipasi secara kondusif.

b. Teganya Suplemen Hukum

Penegakan hukum berlaku sama untuk semua unsur yang ada, baik di kalangan pemerintah sendiri, masyarakat secara luas, maupun pada pelaku usaha swasta. Sub indikator: sanksi untuk pedagang yang melanggar peraturan. Sanksi untuk para pedagang yang melanggar aturan dari PERUSDA sampai saat ini masih belum ada, namun sanksi itu akan dibuat dengan tujuan agar para pedagang menjadi tertib dan tidak berjualan seenaknya mereka saja.

c. Transparansi

Transparansi adalah suatu konsep yang menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan. Pelaku usaha swasta menghendaki adanya transparansi dalam segala hal yang terkait dengan kebijakan dalam rangka menciptakan iklim usaha. Konsep pemahaman transparansi bagi pelaku usaha swasta sangat erat kaitannya dengan keterbukaan harga sewa di pasar Tanjungbatu dan harga barang dagangan yang ada di pasar Tanjungbatu. Harga sewa setiap meja dan kios-kios itu berbeda dan cara pembayaran juga berbeda. Untuk pedagang sayur, ikan, daging, dan eceran itu dibayarnya perhari sedangkan ruko-ruko itu dibayarnya perbulan. Transparansi sebagai penyedia informasi tentang

pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

d. Peduli Pada Stekholder

Responsiveness atau sikap proaktif pegawai/pelaku birokrasi terhadap pelaku usaha swasta dalam penyelenggaraan *good governance* sangat penting, sebab banyak hal yang perlu pelibatan pelaku usaha swasta dalam berbagai bidang pembangunan. Misalnya sikap tanggap selama ini yang terjadi di pasar Tanjungbatu Kundur dan cara mengatasinya. Apabila permasalahan yang di keluhkan masyarakat bisa diselesaikan maka PERUSDA akan menyelesaikan dengan segera namun apabila permasalahannya itu sulit untuk di lakukan maka mereka akan menanggukannya.

e. Berorientasi Pada Konsensus

Pelaku usaha swasta menganggap konsensus yang tercipta selama ini dengan pegawai/pelaku birokrasi telah menunjukkan kondisi atau harapan yang sesuai. *Consensus orientation* sebagai indikator *good governance* ditinjau dari solusi penyelesaian masalah di pasar Tanjungbatu Kundur. Cara Perusda menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara melakukan rapat berkali-kali sampai permasalahan tersebut terselesaikan. ketika Perusda ingin membongkar pasar Tanjungbatu Kundur, Perusda meminta bantuan kepada satpol PP untuk keamanan pada saat merobohkan bangunan pasar.

f. Keadilan

Konotasi equity pada prinsipnya adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan dalam berbagai hal kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan atau *good governance*. Sub indikator Equity adalah penempatan pedagang ke pasar yang baru. Pada saat pasar tersebut selesai di renovasi maka PERUSDA akan melakukan cabut undi kepada para pedagang untuk menempatkan mereka ke posisi yang baru. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi keributan antar pedagang.

g. Efektivitas dan efisien

Prinsip utama yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan *good governance* adalah efektivitas dan efisien. Ketepatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kegiatan penting untuk terus dibiasakan, demikian pula dengan efektivitas dengan orientasi pada hasil guna. Efektivitas tertuju pada tujuan yang hendak dicapai, dengan ditopang oleh efisiensi dalam hal; biaya, waktu, pikiran, tenaga, dan berbagai hal lain. PERUSDA berharap agar para pedagang bisa bekerja sama dengan mereka untuk menjaga kebersihan pasar Tanjungbatu, mengembangkan pasar, dan menjaga keamanan pasar Tanjungbatu.

h. Akuntabilitas

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban seorang pejabat publik terhadap pekerjaan yang dilakukannya kepada masyarakat secara luas. Pertanggungjawaban tersebut antara lain dalam hal efisiensi pemantauan harga di pasar Tanjungbatu, dan tanggungjawab dalam

pembenahan berbagai fasilitas yang ada secara maksimal. Setiap harinya pihak PERUSDA akan melakukan pengecekan harga di pasar Tanjungbatu ini. hal itu dilakukan agar para pedagang tidak seenaknya bisa menaikkan harga dagangan mereka kepada pembeli dan Perusda akan memberikan fasilitas yang cukup untuk Masyarakat dan Perusda akan menyediakan banyak meja untuk para pedagang agar mereka tidak berjualan di pinggiran jalan agar pasar Tanjungbatu bisa menjadi lebih rapi dan tertata.

i. Visi Strategi

Visi Strategi akan memberi arah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu pelaku usaha swasta secara bersama harus dilibatkan secara bersama dalam merumuskan visi strategis program pemerintah baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Rencana Perusda selanjutnya adalah ingin merenovasi pasar yang ada di belakang balai pemuda dan mengambil alih pengelolaan pasar yang ada di Perayun agar mereka bisa merenovasi pasar di sana yang sudah lama tidak berfungsi.

3. Pilar Masyarakat

Masyarakat terdiri dari berbagai elemen, antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik/akademisi, dan tokoh pemuda. Dalam menggali informasi tentang Kebijakan tata kelola (Governance) Perusahaan Daerah pada pasar Tradisional di Kecamatan Kundur. Temuan penelitian dan analisis dari masing-masing indikator diperoleh data sebagai berikut:

a. Transparansi

Masyarakat menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan bukan tanpa keterlibatan masyarakat, tetapi adalah bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Respons masyarakat terhadap transparansi pemerintahan selama ini khususnya mengenai aspek keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti harga sewa di pasar Tanjungbatu Kundur. Mereka membayar sewa setiap hari kepada Perusda dengan harga sewa setiap pedagang itu beda-beda kalau untuk orang-orang yang berjualan di akau pedagang ikan itu seharusnya Rp 6000, pedagang sayur Rp 5000, Pedagang eceran Rp 4000, kios Rp 150.000, dan Ruko Rp1.000.000.

b. Peduli Pada stekholder

Dalam perspektif masyarakat responsiveness yang ditunjukkan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan kecenderungan yang memuaskan atau sesuai harapan. Kecenderungan kearah itu terlihat dari respons yang diberikan atau tanggapan masyarakat menyangkut responsiveness, yaitu dilihat dari tanggapan pedagang mengenai cara kerja PERUSDA. Masyarakat mengatakan bahwa Tanjungbatu Kundur ini ialah kurangnya fasilitas pasar, salah satu permasalahan yang sering di keluhkan oleh masyarakat yaitu WC, kurangnya meja untuk pedagang berjualan dan kurangnya area parkir..

c. Berorientasi pada Konsensus

konsensus orientasi sebagai indikator *good governance* ditinjau dari tiga sub indikator, yaitu kebijakan yang diambil disosialisasikan terlebih dahulu sehingga tidak merugikan masyarakat. Salah satu bentuk sosialisasi itu adalah model Musrenbang dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, dan untuk sub indikator berikutnya adalah komunikasi dengan elemen masyarakat. PERUSDA telah memberi tahu kepada masyarakat bahwa mereka akan mengadakan sosialisasi mengenai pasar Tanjungbatu Pasar Tanjungbatu.

d. Keadilan

Keadilan pada prinsipnya adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. sifat PERUSDA ke pedagang semuanya sama rata tidak ada dibedakan semua di perlakukan sama oleh mereka.

e. Efektif dan Efisien

Efektif dan efisien adalah prinsip utama yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan *good governance*. Efektivitas tertuju pada tujuan yang hendak dicapai, dengan ditopang oleh efisiensi dalam hal; biaya, waktu, pikiran, tenaga, dan berbagai hal lain. para masyarakat berharap agar pasar tersebut menjadi bagus, bersih, rapi dan pengunjungnya juga semakin ramai.

f. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban seorang pejabat publik terhadap pekerjaan yang dilakukannya kepada masyarakat secara luas merupakan wujud

akuntabilitas. Pertanggungjawab dalam pembenahan berbagai fasilitas yang ada secara maksimal. Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat adalah WC yang tidak pernah ada sejak pasar itu dibangun sehingga membuat mereka sulit jika ingin buang air, lalu ruang parkir yang kurang sehingga membuat pengunjung susah untuk memarkirkan kendaraanya.

g. Visi Strategi

Visi strategi sebagai pemberi arah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu masyarakat secara bersama harus dilibatkan dalam merumuskan visi strategis program pemerintah baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Para masyarakat berharap agar pasar tersebut menjadi lebih bagus bangunanya, dan fasilitasnya semangkin banyak untuk para pedagang.

Hasil dari Tiga Elemen Governance dapat dilihat bahwa pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga dengan Sektor swastanya, PERUSDA telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Pasar Tanjungbatu Ini menjadi bagus, PERUSDA juga akan menyediakan fasilitas yang selama ini di minta masyarakat. Hal itu dilakukan agar Masyarakat puas dengan pelayanan yang di berikan kepada mereka.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penyelenggaraan kebijakan Tata Kelola (Governance) Perusahaan Daerah pada pasar Tradisional di Kecamatan Kundur pada prinsipnya telah mengacu

pada indikator Good Governance yang meliputi Negara atau Pemerintah (*state*), Sektor swasta (*Private sector*), dan Masyarakat (*sociaty*)

1. pemerintah sebagai pelaku utama *good governance*, yang menjadi pertimbangan adalah pada indikator Transparansi dan visi strategi Kedua indikator tersebut dalam perspektif pelaku usaha swasta dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dibenahi oleh pemerintah, karena terkait dengan realitas aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.
2. Sektor swasta, pada indikator ini PERUSDA telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik hanya saja ada beberapa tahap yang harus diperbaiki yaitu pada rule of law dan visi strateginya. kedua prinsip tersebut perlu diperbaiki lagi karena menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. dari kedua tahap tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi masyarakat jika masyarakat melanggar aturan yang telah dibuat oleh mereka. selanjutnya pada visi strategi dapat dilihat bahwa PERUSDA kurang dalam memperhatikan pembanguan pasar di Kecamatan Kundur.
3. Masyarakat (*sociaty*) yang harus diperhatikan lagi adalah pada tahap consensus orientation. pada tahap ini dapat dilihat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri sosialisasi yang dibuat oleh PERUSDA untuk kemajuan pasar Tanjungbatu.

## **B. Saran**

Untuk menjamin keberadaan pasar tradisional yang baik, kebijakan-kebijakan yang akan membantu meningkatkan daya saing pasar tradisional harus di ciptakan dan di laksanakan seperti:

1. Aparat pemerintah setempat diharapkan dapat melindungi keberadaan pasar ini yang menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat, serta terus melakukan pembaharuan agar tercipta kenyamanan berbelanja bagi pembeli agar tercapai peningkatan pendapatan pedagang.
2. Perusda sebagai sektor swasta harus sering bertnya kepada pedagang mengenai permasalahan mereka di pasar untuk mendapatkan pengelolaan yang baik di pasar Tradisional. Memperbaiki keadaan pasar seperti kebersihan, ketertiban, kenyamanan agar para pembeli merasa nyaman untuk berbelanja di pasar tradisional.
3. Masyarakat di sarankan agar bisa menjaga semua fasilitas yang telah di berikan Perusda kepada mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Agustino, Loe.2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Media Presindo*, Yogyakarta,2007

Dr. H.Delly Mustafa. *Birokrasi Pemerintah*. Alfabeta, Bandung,2014

Malano, Herman, *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011

Nugroho, Riant. 2003. *Publik Policy*, Elex Media Kompetindo, Jakarta, 2009

Prof.Dr.Miftah Toha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Fajar Interpramata Mandiri, Jakarta: 2012

Subarsono, AG. *Analiis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Sugiono. *Medode Penelitian Administrasi*. Bandung:Alfabeta,2006

Sugiono, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta:2005

Untung Rasidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia. Bandung:2015

## **JURNAL**

<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/84904/09/18:13:21>)

[http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/849\(04/09/18:14.05](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/849(04/09/18:14.05)

<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/download/683/612>

[https://www.batamnews.co.id/berita-21180-pemkab-karimun-bangun-pasar-di-tanjung-batu.html\(05/09/18:20.18\)](https://www.batamnews.co.id/berita-21180-pemkab-karimun-bangun-pasar-di-tanjung-batu.html(05/09/18:20.18))

[https://www.researchgate.net/publication/326034136\\_Perumusan\\_Strategi\\_Pengelolaan\\_Pasar\\_Tradisional\\_di\\_Kabupaten\\_Sumedang\(05/09/18:21:56\)](https://www.researchgate.net/publication/326034136_Perumusan_Strategi_Pengelolaan_Pasar_Tradisional_di_Kabupaten_Sumedang(05/09/18:21:56))

[http://repository.radenintan.ac.id/2125/1/SKRIPSI.pdf\(20/01/2019:21.22\)](http://repository.radenintan.ac.id/2125/1/SKRIPSI.pdf(20/01/2019:21.22))